



LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2017



KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tamuan, 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun Laporan Kinerja.

Sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Sratgis (Renstra), kami telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya akan di capai menurut target dan standar yang di tentukan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan ini kami susun, semoga dapat menjadi bahan masukan dan berguna bagi kita semua.

Tamuan, Februari 2018

CAMAT AIRPURA,

JUNAI, SH, MM

Penata Tk. I

NIP. 19690630 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Airpura	1
1.3 Susunan Kepegawaian	2
1.4 Isu-isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	6
3.2 Realisasi Anggaran	9
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PANDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura dan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan Airpura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial serta pelayanan masyarakat.

Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja pada Kecamatan Airpura tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna mengevaluasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah di Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Kecamatan Airpura dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial serta pelayanan masyarakat, dan sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Airpura

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan; dan
- h. penyelenggaraan.

1.3 Susunan Kepegawaian Kantor Camat Airpura

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- Camat sebagai Pejabat eselon III. A : 1 orang
- Sekretaris Kecamatan sebagai pejabat eselon III.B : 1 orang
- Kepala Seksi sebagai Pejabat eselon IV.A : 5 orang
- Kasubbag sebagai Pejabat eselon IV. B : 2 orang

Berdasarkan hasil inventarisir sampai dengan Desember 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kecamatan Airpura adalah sebanyak 11 orang dan 5 orang tenaga sukarela (Non ASN) dengan rincian sebagai berikut :

- Pejabat eselon III. A : 1 orang
- Pejabat eselon III.B : 1 orang
- Pejabat eselon IV.A : 5 Orang
- Pejabat eselon IV. B : 2 Orang
- Staf / Pelaksana : 2 Orang

- Tenaga Sukarela : 5 Orang
(Struktur Organisasi terlampir)

1.4 Isu-isu Strategis

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yang mana Camat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Isu-isu strategis di Kecamatan Airpura, yaitu :

a. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Nagari.
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Airpura yang baik.
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan Airpura.
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan.

b. Kondisi Eksternal

- Banyak kegiatan di semua bidang di Nagari yang seharusnya didampingi, akan tetapi jumlah staf sangat terbatas (bahkan tidak ada staf) di semua Seksi di Kecamatan Airpura, sehingga perlu adanya penambahan staf.
- Sebagian besar anggota Bamus Nagari masih belum optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Nagari.
- Kurangnya kesejahteraan perangkat nagari sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

Kecamatan Airpura secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Kekuatan :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang)

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Threats (ancaman)

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target yang dicapai oleh Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2017 adalah :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan PATEN	Fasilitasi Perekaman E-KTP	70 %
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Nilai LAKIP Kantor Camat	B
3	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Dibina	10 Nagari

Untuk mencapai Sasarn Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2017 maka di implementasikan/dilaksanakan kedalam Program dan Kegiatan berikut :

1. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2016. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

a. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Kantor Camat Airpura Tahun 2016

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Airpura Tahun ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan PATEN	Fasilitasi Perekaman E-KTP	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	70 %	94,48 %	135 %
Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	B		
Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Dibina	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	10 Nagari	10 Nagari	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sebesar % termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori Sangat Baik. Dengan capaian % indikator kinerja termasuk berhasil dengan tingkat capaian ≥ 84 %.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Kantor Camat Airpura Tahun Ini Dan Beberapa Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Kantor Camat Airpura tahun ini dan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	REALISASI					CAPAIAN				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
CAPAIAN (%)	97,66	98,72	98,40	99,71	88,89	97,66	98,72	98,40	99,71	88,89

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Airpura Beserta Indikator Kinerja Dan Target Tahunannya

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Pada Awal Renstra	Target Kinerja Sasaran					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang dibina	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari	10 nagari
II	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Peningkatan nilai LAKIP Kecamatan Airpura	Nilai LAKIP Kecamatan Airpura	B	B	B	B	B	BB	BB
III	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan PATEN	Persentase perekaman KTP-EI masyarakat	62 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Airpura meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

a. Lingkungan Internal

o Kekuatan :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Adanya sarana dan prasarana

o Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

o Peluang :

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

c. Hambatan :

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Airpura dari 9 (sembilan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 200.153.300,- realisasi Rp. 163.618.824,- (81.80%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil/keluaran : penunjang operasional kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 160.068.250,- realisasi Rp. 159.702.400,- (99,77%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan , kendaraan, gedung kantor.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 22.500.000,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil/keluaran : peningkatan sumber daya manusia dan bertambahnya wawasan pegawai kecamatan.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 8.800.000,- realisasi Rp. 8.800.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil/keluaran : peningkatan disiplin pegawai kecamatan dalam hal penggunaan pakaian dinas.

5. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 14.564.900,- realisasi Rp. 14.564.900,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil/keluaran : tertibnya administrasi keuangan Nagari.

6. Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 84.444.890,- realisasi Rp. 84.444.890,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 6.200.000,- realisasi Rp. 6.200.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Distribusi Raskin dengan lancar dan tertib.

8. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 24.240.000,- realisasi Rp. 24.240.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan upacara HUT RI.

9. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 14.030.130,- realisasi Rp. 14.030.130,- (99,97%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau.

Tabel Realisasi Anggaran :

No.	Program/Kegiatan	Belanja (Rp.)			Hasil Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.153.300	163.618.824	81.80			
	Kegiatan :						
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	5.700.000	5.700.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	42.119.320	31.319.320	70.35	12 bulan	12 bulan	100
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.622.000	18.622.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	4. Penyediaan alat tulis kantor	21.541.280	21.541.280	100	12 bulan	12 bulan	100
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.152.000	16.152.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	6. Penyediaan komponen	9.873.700	9.873.700	100	12 bulan	12 bulan	100

	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.900.000	3.900.000	100	3 media	3 media	100
	8. Penyediaan makanan dan minuman	14.795.000	14.795.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.150.000	8.415.524	24,64	12 bulan	12 bulan	25
	10. Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	33.300.000	30.225.000	100	12 bulan	12 bulan	100
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	160.068.250	159.702.400	99,77			
	Kegiatan :						
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	117.965.000	117.600.000	99,69	11 item	11 item	100
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.426.500	3.426.500	100	1 paket	1 paket	100
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.676.750	38.675.900	99,99	3 unit	3 unit	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.800.000	8.800.000	100			
	Kegiatan :						
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8.800.000	8.800.000	100	11 orang	11 orang	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.500.000	0	0			
	Kegiatan :						
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.500.000	0	0	3 orang	0	0
5.	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	14.564.900	14.564.900	100			
	Kegiatan :						
	1. Pembinaan dan	14.564.900	14.564.900	100	10 nagari	10 nagari	100

	Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari						
6.	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	84.444.890	84.444.890	100			
	Kegiatan :						
	1. Pembinaan PKK Kecamatan	27.541.600	27.541.600	100	12 bulan	12 bulan	100
	2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	8.976.650	8.976.650	100	10 Nagari	10 Nagari	100
	3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan	12.394.820	12.394.820	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.971.140	1.971.140	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	7.200.000	7.200.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	6. Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	25.360.680	25.360.680	100	12 bulan	12 bulan	100
7.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.200.000	6.200.000	100			
	Kegiatan :						
	1. Distribusi Raskin	6.200.000	6.200.000	100	12 bulan	12 bulan	100
8.	Program Penerangan Wawasan Kebangsaan	24.240.000	24.240.000	100			
	Kegiatan :						
	1. Pelaksanaan Upacara HUT RI	24.240.000	24.240.000	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
9.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	14.030.130	14.030.130	100			
	Kegiatan :						
	1. Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau	14.030.130	14.030.130	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
JUMLAH		535.001.470	475.601.144	88,89			

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 :

URAIAN	2014		
	Anggaran	Relisasi	Persentase
Belanja Daerah	1.191.498.057	1.130.963.046	94,92
Belanja Tidak Langsung	757.354.170	702.366.003	92,74
Belanja Langsung	434.143.887	428.597.043	98,72

URAIAN	2015		
	Anggaran	Relisasi	Persentase
Belanja Daerah	1.374.085.438	1.317.568.343	95,89
Belanja Tidak Langsung	864.969.176	816.590.674	94,41
Belanja Langsung	509.116.262	500.977.669	98,40

URAIAN	2016		
	Anggaran	Relisasi	Persentase
Belanja Daerah	1.495.752.512	1.317.568.343	88,08
Belanja Tidak Langsung	1.015.046.602	819.452.433	80,73
Belanja Langsung	480.705.910	470.145.973	97,80

URAIAN	2017		
	Anggaran	Relisasi	Persentase
Belanja Daerah	1.399.531.099	1.301.658.910	93,00
Belanja Tidak Langsung	864.529.629	826.057.766	95,54
Belanja Langsung	535.001,470	475.601.144	88,89

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Airpura Tahun 2017 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan LKj Kecamatan Camat Airpura Tahun 2016 ini, baik dari segi bentuk penyajian dan dari segi prinsip seperti transparansi serta akuntabilitas masih jauh dari yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan masih dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Langkah – langkah penyempurnaan Laporan Kinerja ini senantiasa merupakan prioritas kami agar nantinya dapat terwujud akuntabilitas yang ingin kita capai bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya pada Kecamatan Airpura.

Kedepannya LKj ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pada Kecamatan Airpura.